

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan sosial dan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh negara dunia pertama yang menjadi sentral peradaban dunia. Mereka menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang mengakibatkan tatanan dunia menjalankan pasar bebas dengan kemajuan industrial yang pesat. Kemajuan industrial yang kian tumbuh pesat telah berdampak pada semakin terbukanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Keterbukaan kesempatan kerja ini membutuhkan banyak tenaga kerja baik itu laki-laki maupun perempuan sehingga peran perempuan dapat meluas di ranah publik.

Meluasnya porsi perempuan dalam berpartisipasi atas kemajuan industrial diakibatkan atas tuntutan kehidupan ekonomi yang semakin tinggi atas pengaruh sistem kapitalis yang berkembang. Peran perempuan ini merupakan bentuk kesadaran diri dari perempuan bahwa mereka layak untuk bekerja selayaknya laki-laki demi membantu menopang kondisi keluarga. Namun, upaya kaum perempuan untuk ikut serta dalam perindustrian berdampak pada kesejahteraan mereka. Perempuan-perempuan yang bekerja di perindustrian menjadi termarginalkan akibat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara maupun perusahaan.

Kelemahan perempuan ini diakibatkan atas melekatnya stereotip masyarakat terhadap ketimpangan gender yang membuat perempuan yang bekerja

mengalami ketidakadilan<sup>1</sup>. Ketidakadilan ini berupa pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin yang ditimbulkan oleh pandangan masyarakat bahwa wilayah peran perempuan adalah domestik dan peran laki-laki adalah publik. Artinya, perempuan diberi tugas mengurus urusan rumah tangga saja, sedangkan laki-laki mengurus urusan publik. Padahal, sebenarnya pekerjaan yang tersedia tidaklah memandang jenis kelamin melainkan terdapat persyaratan bagi individu yang harus terpenuhi, seperti halnya memiliki kecakapan, kemampuan, dan memiliki kualifikasi dalam pekerjaan itu, dengan tidak memandang apakah ia seorang laki-laki atau perempuan. Stereotip yang berkembang di masyarakat Indonesia ini tentunya tidak mengurungkan niat para perempuan yang berusaha untuk membantu kondisi ekonomi keluarga mereka. Walaupun hanya bermodalkan tenaga tanpa memiliki keahlian dan keterampilan khusus, perempuan-perempuan rela untuk menjadi buruh di perusahaan karena hal tersebut merupakan cara yang halal untuk mendapatkan upah.

Beberapa perusahaan di Indonesia terutama perusahaan bidang garmen dan tekstil memiliki angka buruh perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan buruh laki-laki. Namun, tingginya jumlah buruh perempuan ini tidak mempengaruhi hubungan yang baik antara buruh perempuan, buruh laki-laki, personalia, perusahaan, dan pemerintah. Pola hubungan yang buruk tersebut dapat dilihat atas posisi perempuan yang tidak tergambarkan setara melalui kebijakan-kebijakan pemerintah maupun perusahaan yang terkait. Isu-isu gender yang terkait mengenai pelanggaran hak-hak buruh perempuan ini terdiri dari yaitu (1) kesetaraan

---

<sup>1</sup>Susanti, Erma. 2005. *Berperan Tapi Dipinggirkan: Wajah Perempuan Dalam Ekonomi*. Jakarta: Konsorsium Swara Perempuan (KSP) and The Ford Foundation Jakarta. Hal. 3

pengupahan bagi pekerjaan yang sama jenisnya maupun setara, (2) pelecehan seksual, (3) jaminan sosial yang tidak terpenuhi terutama kesehatan reproduksi, (4) dan perenggutan hak seperti hak berorganisasi, hak cuti hamil, hak cuti haid, serta cuti menyusui.

Permasalahan *pertama* yaitu upah buruh perempuan ternyata tidak setara dengan kebutuhan khusus untuk perempuan sehingga buruh perempuan masih terbelenggu pada lingkaran kemiskinan. Upah yang diterima buruh perempuan sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh beberapa perusahaan membayar buruh tidak sesuai UMK yang telah ditetapkan dan adanya pembedaan pengupahan<sup>2</sup>. Belum lagi kewajibannya membantu orang tua yang miskin atau menanggung biaya pendidikan saudara-saudara di desanya atau bahkan bagi mereka yang telah berkeluarga harus membiayai sekolah anak-anak mereka. Taraf hidup mereka sebagai buruh tidak mengalami peningkatan, tetapi buruh-buruh perempuan itu menyadari bahwa taraf hidupnya sebagai buruh perusahaan akan lebih buruk bila mereka tetap tinggal di desa.

Permasalahan *kedua*, adalah tindakan pelecehan seksual secara verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh para personalia maupun buruh laki-laki. Sering kali buruh perempuan mengalami ketertindasan dan berujung pada bentuk

---

<sup>2</sup> Aktivistis perempuan Gefarina Johan mengatakan kondisi pekerja perempuan di Depok dan Bekasi tidak jauh berbeda. Bahkan, pekerja perempuan juga masih dimarjinalkan. Tidak heran, lanjutnya, bila gaji yang mereka terima masih dianggap sebelah mata. "Buruh yang ada di Depok dan Bekasi masih termarjinalkan. Indikasinya, gaji yang diterima masih dipandang dibedakan dengan laki-laki. Ini yang terus kita perjuangkan," ungkapnya. (Sumber: <http://economy.okezone.com/read/2013/10/17/320/883069/diskriminasi-gaji-buruh-perempuan-lebih-rendah> diakses pada tanggal 23 Maret 2014, pukul 14:13 WIB.)

pelecehan seksual<sup>3</sup>. Pelecehan seksual yang paling sering dialami oleh buruh perempuan adalah bentuk verbal dimana mereka tidak menyadari bahwa terdapat beberapa ucapan yang mereka terima telah melecehkan posisinya sebagai perempuan. Kasus-kasus tersebut tidak pernah diproses secara hukum agar pelaku pelecehan seksual mendapatkan hukuman yang setimpal. Selain itu, ketika buruh mengadakan demo untuk menuntut hak mereka, terjadi pelecehan juga dalam demo tersebut. Dimana aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pihak netral justru menggunakan cara kasar yang melecehkan buruh perempuan yang melakukan aksi tersebut.

Permasalahan *ketiga* adalah jaminan sosial dan kesehatan reproduksi buruh perempuan. Masalah ini tidak dianggap penting oleh perusahaan dan kalangan buruh perempuan sendiri, padahal kesehatan reproduksi adalah bagian dari hak kesehatan dasar setiap individu<sup>4</sup>. Kondisi ekonomi yang masih terpuruk di bawah rata-rata menjadikan tingkat kesadaran buruh perempuan terhadap kesehatannya semakin menurun sebab upah mereka terbatas hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan pendidikan anak saja. Di sisi lain, dari pihak perusahaan itu sendiri tidak menyediakan pelayanan kesehatan yang layak. Fasilitas kesehatan yang tersedia tidak dapat digunakan oleh buruh perempuan apabila mereka

---

<sup>3</sup> Menurut Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik, Jumisih, Ada buruh perempuan yang sampai dibopong oleh atasannya, dibawa ke ruang tertentu untuk dicium-ciumi. Ada buruh perempuan yang sampai melakban bajunya karena saking seringnya terjadi pelecehan seksual. Buruh perempuan yang masuk ke WC akan diikuti. (Sumber: <http://www.voaindonesia.com/content/aktivis-stop-diskriminasi-buruh-perempuan-/1776974.html> diunduh pada tanggal 23 Maret 2014, pukul 14:13 WIB.)

<sup>4</sup> Juru Bicara Komite Aksi Perempuan Dina Ardiyanti menjelaskan bahwa, "...Selain itu jaminan kesehatan dan keamanan kerja buruh perempuan terutama di sektor pengalengan ikan, perkebunan dan sektor yang menggunakan zat kimia sebagai salah satu bahan produk juga masih minim." (Sumber: <http://www.pikiran-rakyat.com/node/278706> diakses pada tanggal 26 November 2014, pukul 06:25 WIB.)

bekerja dalam keadaan sakit. Dokter di dalam perusahaan pun tidak selalu ada untuk menangani keluhan-keluhan atas penyakit yang diderita oleh buruh perempuan. Lalu dari sisi kesejahteraan, kebutuhan dasar khas kesehatan reproduksi perempuan seperti pembalut tidak diperhitungkan dalam komponen perhitungan UMK. Selama ini perhitungan kebutuhan hidup layak para buruh yang menjadi dasar UMK selalu berdasarkan kebutuhan laki-laki lajang.

Selain itu, masalah yang *terakhir* adalah perenggutan hak normatif yang dimiliki oleh buruh perempuan<sup>5</sup>. Posisi buruh perempuan semakin tertindas dikarenakan pada aturan cuti haid hanya diperbolehkan dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, padahal seharusnya perempuan berhak atas cuti haid untuk melindungi alat reproduksinya. Aturan yang terkesan sulit bagi buruh perempuan untuk mengurus cuti haid tersebut menjadikannya mengabaikan rasa sakit yang diderita selama waktu haid. Dan juga pihak perusahaan terus-menerus memberikan tugas untuk menyelesaikan target produksi tanpa memedulikan kondisi buruh perempuan terutama bagi mereka yang sedang mengalami sakit ketika haid. Selain itu, terdapat pemberian cuti haid yang tidak sesuai aturan yang ditetapkan dimana apabila seorang buruh perempuan mendapatkan cuti haid pada hari libur sehingga cuti haid tidak diganti pada hari

---

<sup>5</sup> Menurut Kasminah relawan Biro Pendampingan Buruh Lembaga Daya Dharma (BPB-LDD), buruh perempuan hanya sebagai komplemen kebutuhan keluarga sebagai pembantu suami sehingga membuat hak-hak perempuan sering dilecehkan. Cuti haid misalnya, kerap diabaikan oleh perusahaan yang mempersulit pemberian izin. Selain diancam tidak dibayar selama tidak masuk, beberapa buruh yang mengalami nyeri haid juga menghadapi keharusan untuk menyertakan surat dokter atau bahkan pemeriksaan fisik untuk membuktikan buruh tersebut benar-benar sedang datang bulan.

(Sumber: <http://health.detik.com/read/2013/05/01/122725/2235072/763/dokter-cuti-haid-itu-hak-buruh-tak-butuh-surat-dokter-apalagi-cek-fisik?l771108bcj> diakses pada tanggal 20 November 2014, pukul 19:23 WIB.)

efektif sehingga buruh perempuan pada hari efektif yang mendapatkan haid tidak memiliki jatah untuk beristirahat.

Realitas di dalam sektor industri tersebut merupakan praktek diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan. Hak-hak buruh perempuan diabaikan demi keuntungan dari perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan merekrut banyak buruh perempuan namun tidak menjamin hak-hak dasar perempuan dalam kesejahteraan mereka. Padahal, buruh perempuan sangatlah berpengaruh besar terhadap kemajuan ekonomi perusahaan. Hal ini dikarenakan sifat perempuan yang teliti dan rajin menjadikan produksi lebih dapat ditunjang.

Melihat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh buruh perempuan, maka harus ada upaya untuk memperjuangkan nasib buruh-buruh perempuan. Upaya ini dapat dilakukan oleh kaum perempuan yang menggeluti isu-isu gender mengenai hak buruh perempuan terutama keikutsertaan dalam organisasi yang merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi yang berkeadilan. Upaya penyadaran gender tersebut bertujuan agar seluruh masyarakat menjadi setara dan menjunjung hak asasi setiap individu tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan peluang buruh perempuan untuk menyuarakan kepentingan mereka sangatlah besar.

Jawa Timur merupakan wilayah terbesar kedua di sektor Industri setelah Ibu Kota DKI Jakarta. Hal ini tentunya mengakibatkan perluasan jejaring-jejaring serikat buruh maupun LSM perburuhan. Kebutuhan-kebutuhan dasar akan terakomodasi secara baik di dalam program-program yang telah direncanakan. Di dalam kepengurusan organisasi terdapat sosok-sosok yang menonjol aktif dalam menggaungkan isu-isu perburuhan. Sosok-sosok pejuang kaum buruh atau yang

sering disebut sebagai aktivis buruh, mampu menumbuhkan semangat yang berkobar-kobar kepada kaum buruh bahwa mereka layak untuk diperjuangkan. Hal ini sangat berkaitan dengan kebutuhan buruh perempuan atas penyadaran gender yang seharusnya menjadi salah satu tujuan yang dimiliki aktivis organisasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan buruh.

Penyebaran isu-isu perburuhan terutama masalah buruh perempuan juga dilakukan oleh para perempuan aktivis buruh yang berasal dari berbagai aliansi organisasi buruh di Kabupaten Mojokerto. Partisipasi buruh perempuan di Kabupaten Mojokerto dirasa penting karena dalam diri buruh perempuan sendiri, kesadaran untuk menjadi pengurus atau pemimpin masih rendah. Masih banyak hambatan yang mencegah buruh perempuan untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka sehingga buruh perempuan tidak berani mengungkapkan aspirasi mereka dan berorganisasi.

Berdasarkan penuturan berbagai realitas mengenai buruh perempuan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Perempuan Aktivistis Buruh di Kabupaten Mojokerto dalam menggaungkan isu-isu gender dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hak normatif buruh perempuan di lingkungan perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto. Hal ini dikarenakan bahwa Perempuan Aktivistis Buruh di Kabupaten Mojokerto merupakan aktor di dalam struktur perindustrian. Ia memiliki peran besar dalam mengajak buruh perempuan untuk turut aktif dalam kegiatan yang sensitif gender. Mereka mampu menjadi provokator yang menghendaki kesetaraan posisi buruh perempuan di mata

perusahaan dan meniadakan bentuk-bentuk diskriminasi dan eksploitasi terhadap buruh perempuan.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yaitu:

1. Apa saja isu pelanggaran hak normatif buruh perempuan di lingkungan perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto yang menjadi agenda perjuangan Perempuan Aktivistis Buruh?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Perempuan Aktivistis Buruh dalam memperjuangkan kesetaraan hak-hak normatif buruh perempuan di lingkungan perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Peneliti menyadari bahwa untuk memahami suatu realitas sosial politik tertentu harus memfokuskan pada ruang lingkup yang sempit sehingga hasil yang didapatkan dapatlah diuji validitasnya, sehingga Kabupaten Mojokerto merupakan pilihan dari peneliti untuk menambah wawasan mengenai isu-isu pelanggaran apa saja yang disebarkan oleh perempuan aktivis buruh terhadap buruh perempuan di lingkungan perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto. Selain itu untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran dan strategi yang digunakan Perempuan Aktivistis Buruh di Kabupaten Mojokerto dalam menanggapi pelanggaran hak normatif buruh perempuan yang berkembang di lingkungan perusahaan PMDN.



## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat berdasarkan karakteristik buruh perempuan di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

- a Menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang Upaya Perempuan Aktivistis Buruh dalam Memperjuangkan Hak-Hak Normatif Buruh Perempuan.
- b Dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk penelitian yang berkaitan dengan isu gender di perburuhan.
- c Dapat dijadikan sebagai bahan untuk menginformasikan peran Perempuan Aktivistis Buruh di Kabupaten Mojokerto sebagai penggerak buruh perempuan dan sejauh mana pengangkatan isu gender di lingkungan perusahaan PMDN.

## 1.5. Kerangka Teori

### 1.5.1. Teori Feminisme Sosialis

Teori Feminis ini berupaya untuk menganalisis kondisi yang melahirkan sebuah pemahaman keberlangsungan perempuan dan mengetahui makna dari sosok perempuan. Dasar pandangan feminis adalah kesetaraan itu tidak bersifat alamiah yang sudah ada sejak manusia dilahirkan. Dengan mengembangkan pemahaman macam ini kaum feminis dituntut untuk melihat pengalaman material sehari-hari kaum perempuan dan memeriksa cara mereka digambarkan dan menggambarkan diri dalam berbagai praktek.

Feminisme membongkar pengalaman ketertindasan sebagai perempuan, mempertanyakan relasi-relasi kekuasaan yang berlangsung pada perempuan. feminisme memperjuangkan kemanusiaan kaum perempuan menuju penataan hubungan-hubungan sosial baru di mana perempuan sama dengan laki-laki menjadi subjek utuh dalam membuat keputusan dalam alokasi kekuasaan dan sumber-sumbernya<sup>6</sup>. Sehingga seiring berkembangnya kondisi masyarakat yang kian beragam mengakibatkan teori feminis ini menjadi beragam perspektif yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme Marxis dan sosialis, feminisme psikoanalisis, feminisme posmodern, feminisme multikultural dan global, serta ekofeminisme.

Feminisme sosialis ini dipengaruhi oleh pemikiran Louis Althusser dan Jürgen Habermas. Feminis sosialis berawal dari revolusi Eropa yang menampakkan adanya keprihatinan terhadap kaum perempuan yang kedudukannya identik dengan kaum proletar pada masyarakat kapitalis Barat. Awal industrialisasi, Alexandra Kollontai dalam tulisannya *Communism and the Family*, pada masanya tampak begitu optimis terhadap potensi disintegrasi “keluarga patriarkal” kelas pekerja sebagai unit ekonomi dan institusi kekuasaan kelas dalam mengorganisasikan, mengontrol, dan mereproduksi tenaga kerja. Masa ini terlihat adanya eksploitasi secara brutal terhadap perempuan dan anak yang tidak ada batasannya karena tidak ada aturan yang mengikat mengenai posisi

---

<sup>6</sup> Jackson, Stevi dan Jackie Jones. 2009. *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*. Yogyakarta&Bandung: Jalasutra. Hal.2

perempuan dan anak saat itu. Keunikan ini yang menjadikan Marx dan Engels untuk meramalkan akan runtuhnya sebuah sistem kapitalis di Abad 19<sup>7</sup>.

Feminisme sosialis ini mengkritik gagasan feminisme Marxis. Kritikan ini dilontarkan oleh Alison Jaggar bahwa feminisme marxis tidak dapat membahas rinci mengenai opresi terhadap perempuan oleh laki-laki<sup>8</sup>. Bagi feminisme Marxis berargumen bahwa kapital adalah opresor utama terhadap perempuan sebagai pekerja, dan laki-laki, paling tinggi, adalah opresor sekunder terhadap perempuan sebagai perempuan. karena itu, Jaggar mempertanyakan *feminis* apa yang secara khusus dibahas dari feminisme Marxis, dan apakah benar laki-laki adalah sekadar opresor sekunder, atau tidak langsung, terhadap perempuan. ia juga mempertanyakan apakah ada ruang yang memadai dalam analisis feminisme Marxis untuk mengungkapkan ketidakpuasan mengenai isu-isu perempuan yang tidak ada hubungannya dengan sifat dan fungsi pekerjaan perempuan. sehingga Jaggar mengkhawatirkan bahasan di dalam feminisme Marxis tidak pernah menyentuh bahasa seksisme.

Sehingga Jaggar menilai feminisme Marxis yang diterapkan di negara-negara komunis mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan bahwa penghapusan kapitalisme yang seharusnya terjadi di negara tersebut belum secara substansial mengubah kehidupan perempuan sosialis. Ia mengamati bahwa karena masuknya perempuan sosialis ke dalam pasar tenaga kerja jarang diikuti oleh sosialisasi secara penuh pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, perempuan di negara-

<sup>7</sup> Watkins, Susan Alice, Marisa Rueda dan Marta Rodriguez. 2007. *Feminisme untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book. Hal 80.

<sup>8</sup> Tong, Rosemarie Putnam. 2008. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta&Bandung: Jalasutra. Hal 170.

negara komunis sangat mungkin harus melakukan pekerjaan ganda<sup>9</sup>. Oleh karena itu, jika Marxisme adalah untuk memastikan pembebasan perempuan, Marxisme harus menggabungkan beberapa pemahaman, bukan saja mengenai kapitalisme, tetapi juga mengenai patriarki sebagai sistem yang kuat dan melekat. Sehingga Jaggar menyatakan bahwa feminisme Marxis ini pada dasarnya buta gender.

Berawal dari kritik Jaggar inilah feminisme sosialis ini mengawinkan antara pandangan feminisme marxis dan radikal<sup>10</sup>. Dimana ia beranggapan bahwa analisis kelas tidak bisa berjalan begitu saja tanpa ada pengaruh dari analisis patriarki. Feminisme sosialis memiliki ketegangan antara *kebutuhan kesadaran feminis* di satu pihak dan *kebutuhan menjaga integritas materialism Marxisme* di lain pihak, sehingga analisis patriarki perlu ditambahkan dalam analisis *mode of production*. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Maka dari sinilah perempuan harus mampu melawan kedua sistem yang kuat ini. Perempuan dapat dibebaskan dari penindasan tersebut apabila sistem kapitalis ini digantikan dengan masyarakat sosialis yaitu masyarakat egaliter tanpa kelas-kelas<sup>11</sup>.

Teori ini juga berkaitan dengan teori kapitalis patriarki yang diungkapkan pertama kali oleh Zillah Eisenstein, menyamakan dialektika antara struktur kelas kapital dengan struktur hirarki seksual. Sehingga, feminisme sosialis menganggap bahwa penindasan perempuan bisa melahirkan kesadaran revolusi, tapi bukan revolusi model perempuan sebagai jenis kelamin (*women as sex*) yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 173

<sup>10</sup> Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 90.

<sup>11</sup> Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 69.

diproklamasikan oleh feminis radikal. Namun bagi Eisenstein, ketidakadilan bukan akibat dari perbedaan biologis laki-laki perempuan, tetapi karena penilaian dan anggapan (*social construction*) terhadap perbedaan itu<sup>12</sup>. Sehingga, menurut Juliet Mitchell (dalam Tong, 2004) bahwa sikap terhadap perempuan tidak akan benar-benar berubah selama psikologi perempuan dan laki-laki masih didominasi oleh simbol falil, sehingga patriarki juga kapitalisme harus dihapuskan untuk secara sungguh-sungguh memanusiakan masyarakat.

Iris Young menawarkan bahwa hanya kategori yang *melek* gender, seperti “pembagian kerja”, mempunyai kekuatan konseptual untuk mentransformasikan teori feminisme Marxis menjadi teori feminis sosialis yang mampu membahas seluruh kondisi perempuan yaitu posisi perempuan di dalam keluarga dan juga di tempat kerja, peran reproduksi dan seksual perempuan, dan juga peran produktif perempuan<sup>13</sup>. Keuntungan dari analisis pembagian kerja ini adalah analisis pembagian kerja memberikan perhatian kepada orang sebagai individu yang melakukan proses produksi di dalam masyarakat, sedangkan dalam analisis kelas standar bahwa untuk memindai sistem produksi dalam istilah yang paling umum yang ada.

Dalam konteks alienasi dari rubrik *motherhood*, perempuan juga teralienasi atas perannya sebagai ibu. Menurut Jaggar, dengan cara yang sama seorang buruh perempuan dialienasi dari produk yang dikerjakannya atau dihasilkan dari tubuhnya (masalah melahirkan seorang anak yang akan dipekerjakan untuk seorang majikan maupun hasil reproduksi yang tidak bisa ia

---

<sup>12</sup> Fakih. *Log. cit.* Hal. 92.

<sup>13</sup> Tong. *Log. cit.* Hal. 179.

nikmati atas tenaga yang dihasilkan tubuhnya)<sup>14</sup>. Seorang buruh perempuan mengalami hal yang sama, tubuhnya mulai terasa seperti benda semata, sekedar mesin untuk mengeluarkan tenaga untuk bekerja.

Melalui pandangan-pandangan tersebut maka Iris Young meyakini kapitalisme dan patriarki memiliki keterkaitan yang erat sehingga dengan adanya pembagian kelas, kita tidak lagi menggunakan satu teori (Marxis) untuk menjelaskan kapitalisme yang *netral gender* dan teori yang lain (feminisme) untuk menjelaskan patriarki yang *bias gender*. Yang lebih tepatnya kita memerlukan satu teori tunggal yaitu teori Feminisme Sosialis untuk menjelaskan *kapitalis patriarki yang bias gender*.

Feminisme sosialis merupakan gerakan untuk membebaskan para perempuan melalui perubahan struktur patriarkat. Perubahan struktur patriarkat bertujuan agar kesetaraan gender dapat terwujud. Menurut para feminis sosialis, perwujudan kesetaraan gender adalah salah satu syarat penting untuk terciptanya masyarakat tanpa kelas, egaliter, atau tanpa hierarki horizontal. Ia melakukan gerakan penyadaran pada kelompok tertindas yaitu perempuan agar mereka bangkit untuk mengubah keadaannya. Timbulnya kesadaran bahwa perempuan adalah kaum tertindas, akan membuat para perempuan bangkit emosinya untuk memperjuangkan kesetaraan. Upaya yang dapat mereka lakukan ini melalui propaganda-propaganda, yang tujuannya memberi kesadaran kepada para perempuan bahwa pekerjaan publik juga layak untuk mereka kerjakan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal. 183.

Propaganda-propaganda yang mereka lakukan ini berupaya agar pembebasan perempuan ini dapat mengarah kepada pemberdayaan perempuan yang mana dulunya ia merupakan kaum tertindas tetapi mulai tersadarkan bahwa harus adanya partisipasi perempuan dalam ranah ekonomi. Partisipasi perempuan ini dapat dilakukan dengan apabila negara sebagai pelaksana kegiatan pembangunan mampu menerapkan kebijakan-kebijakan yang netral gender. Kebijakan merupakan strategi utama karena kebijakan adalah sebuah komitmen politik yang akan menentukan arah kehidupan masyarakat di suatu wilayah khususnya bagi perempuan yang tertindas dari struktur patriarki dan kapitalis.

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga negara ini harus mensosialisasikan kesetaraan gender sebagaimana yang merupakan inti dari propaganda yang dilakukan oleh penganut feminis sosialis. Upaya yang mereka lakukan ini melalui beberapa cara yaitu<sup>15</sup>

- (1) Pembakuan istilah gender dengan acuan pada keberadaan segala sesuatu yang ada di masyarakat secara tradisi, dengan mempertimbangkan berbagai muatan sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam konteks akses terhadap berbagai muatan pembangunan.
- (2) Pendekatan analisis gender tidak lagi sekadar merujuk pada perbedaan biologis atau seks akan tetapi mengacu pada perspektif gender menurut dimensi sosial-budaya.
- (3) Perencanaan pembangunan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan peran gender dan ketergantungan

---

<sup>15</sup> Nugroho, Riant. 2008. *Gender Dan Strategi: Pengarus-Utamaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 35.

antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu hal yang dapat diubah dan akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial budaya.

Hal ini dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, agar kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan selalu diwarnai kepekaan gender. Program kegiatan yang dijalankan secara sinergi, bertahap, dan berkesinambungan, nantinya akan meningkatkan kemampuan kelompok perempuan untuk memperkuat posisi tawar dan peran aktif perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Untuk itu gerakan perempuan di masa depan mempunyai peran strategis dalam menjawab tuntutan dan tantangan masa depan dengan melibatkan berbagai pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka alasan peneliti menggunakan Teori Feminisme Sosialis karena penelitian ini mengkaji kondisi perempuan dalam industri di Kabupaten Mojokerto yang berkaitan dengan perkembangan sistem ekonomi yang terus memarjinalkan peran-peran perempuan. Kondisi-kondisi ini apakah menjadi fokus dari beberapa perempuan aktivis buruh di Kabupaten Mojokerto dalam memperjuangkan kesetaraan sehingga dalam perjuangannya tentu melakukan beberapa upaya-upaya yang dilakukan.

## **I.5.2. Konseptualisasi**

### **I.5.2.1. Perempuan Aktif Buruh**

Perempuan aktivis buruh ini dapat diartikan sebagai agen penggerak yang bekerja aktif mendorong suatu perubahan yang diinginkan. Perubahan yang diinginkan ini adalah menanggapi permasalahan perburuhan yang menunjukkan tidak tercapainya



kesejahteraan bagi kaum buruh. Bagi mereka yang berciri-ciri biologis perempuan memiliki *concern* utama terhadap perubahan kesejahteraan kaum buruh. Perempuan aktivis buruh perlu juga adanya kesadaran politik yang mana mereka tidak hanya proaktif dalam pengajuan tuntutan namun mereka harus peka terhadap isu-isu perburuhan yang ada sehingga aktivis tersebut mampu reaktif terhadap isu yang implikasinya terhadap kesejahteraan buruh. Dengan demikian, gerakan buruh mampu menjadi mitra baik bagi pengusaha, kelompok masyarakat, maupun pemerintah dalam mencari solusi yang tepat atas berbagai persoalan menghadapi kalangan buruh. Kemudian dapat pula seorang perempuan aktivis buruh yang menjadi agen ini dapat melakukan sebuah aktivitas yang berulang seperti membangun semangat buruh-buruh perempuan di dalam perusahaan tersebut dan melanjutkan perjuangannya pada pengorganisasian buruh perusahaan. Perempuan aktivis buruh akan mengumpulkan buruh-buruh perempuan dengan menggunakan cara-cara yang nantinya akan menghasilkan tujuan yang dikehendaki oleh kaum buruh.

Cara-cara untuk pembebasan perempuan ini dilakukan oleh sosok perempuan yang telah memiliki pengalaman dalam menghimpun dan mempengaruhi pandangan buruh perempuan di Kabupaten Mojokerto. Perempuan aktivis buruh ini menggunakan pendekatan-pendekatan kepada buruh perempuan Kabupaten Mojokerto agar buruh perempuan tersadarkan akan posisinya di lingkungan perusahaan dan aktif

berpartisipasi di setiap kegiatan mengenai isu-isu gender di perburuhan. Selain itu, penelitian ini tidak terlepas dari pengaruh luar yaitu serikat buruh, perusahaan dan pemerintah yang mana seluruh unsur di dalam lingkungan buruh ini saling berintergrasi untuk menjalankan sebuah tatanan ekonomi.

### **I.5.2.2. Hak Normatif Buruh Perempuan**

Konsep Hak Asasi Perempuan (HAP) telah diungkapkan oleh Fakhri Mansour (2001) (dalam Budiarjo, 2008) bahwa terdapat dua makna mengenai pengakuan Hak Asasi Perempuan, antara lain *pertama*, hanya dimaknai sekadar berdasarkan akal sehat dimana perempuan diakui sebagai manusia yang telah memiliki hak asasi sejak lahir. Namun, faktanya ternyata bahwa pengakuan ini tidak diikuti oleh tindakan sebagai bukti adanya pengakuan terhadap perempuan sebagai manusia yang memiliki hak asasi sehingga masih saja tidak terlindungi hak-hak dasar mereka. *Kedua*, Hak Asasi Perempuan memiliki visi dan maksud transformasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender<sup>16</sup>.

Hak-hak perempuan tersebut direpresentasikan ke dalam salah satu paragraf dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai Perempuan ini meratifikasi Konvensi perempuan dalam piagam PBB. Deklarasi PBB 1993 menyatakan bahwa perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak

---

<sup>16</sup> Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 257.

asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta warga negara. Di dalamnya terdapat beberapa prinsip-prinsip di dalam Hak Asasi Perempuan. Prinsip-prinsip ini mengartikan bahwa adanya kesamaan dan kesetaraan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki dari seluruh sub-sub bidang kehidupan dimana bertujuan untuk menghapus segala bentuk penindasan dan eksploitatif terhadap perempuan. Prinsip-prinsip Konvensi perempuan ini terdiri dari prinsip persamaan substantif, prinsip non-diskriminatif, dan prinsip kewajiban negara<sup>17</sup>. Prinsip-prinsip tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dalam pelaksanaan kesetaraan haruslah terdapat ketiga prinsip yang nantinya menjadi media evaluatif dalam pelaksanaan kesetaraan. Prinsip tersebut menggambarkan secara umum bagaimana masyarakat mampu memperlakukan perempuan secara adil terutama bagi mereka yang berperan di sektor publik.

### **I.5.2.3. Buruh Perempuan**

Dalam pembahasan mengenai buruh perempuan di dalam perusahaan perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi dari buruh perempuan. Dalam konteks kelas menurut Karl Marx bahwa terdapat dua kelas di dalam masyarakat yaitu kelas pemilik modal atau menguasai faktor-faktor produksi dan kelas proletar. Kelas proletar ini diidentikkan sebagai orang-orang yang diperintah dan dipekerjakan yang berfungsi

---

<sup>17</sup> Irianto Sulistiowati. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 87

sebagai salah satu komponen dalam proses produksi. Kemudian, penjelasan jenis kelamin merupakan suatu kodrati manusia yang telah didapatkan sejak ia lahir, secara biologis alat-alat kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan, hal ini merupakan kodrat dan ketentuan Tuhan<sup>18</sup>. Kemudian apabila dikaitkan dengan konsep gender bermakna suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan atas dasar konstruksi sosial maupun kultural. Sehingga dapat disimpulkan mengenai definisi konsep buruh perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri fisik dan reproduksi serta atas dasar konstruksi sosial dengan menggunakan tenaga dan keahliannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lain dari pemberi.

Buruh perempuan ini dapat dimasukkan ke dalam kategori analisis gender karena tidak hanya didasarkan atas dasar biologis yang memiliki ciri-ciri fisik reproduksi tetapi juga berkonsentrasi pada aspek budaya, sosial, psikologis, dan di luar aspek biologisnya. Buruh perempuan dirasa mampu menyamai posisi mereka terhadap kaum laki-laki.

#### **I.5.2.4. Kesadaran Gender**

Konsep kesadaran gender mengartikan bahwa ada perasaan tahu dan mengerti mengenai posisi perempuan dan proses pencapaian keetaraan gender. Sehingga timbulnya rasa faktor-faktor sosial yang menentukan antara laki-laki dan perempuan atas dasar tingkah laku, yang

---

<sup>18</sup> Fakih. 2006. *Log. cit.* Hal . 6.

mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses dan mengontrol sumber daya. Kesadaran ini membutuhkan penerapan melalui analisa gender menjadi proyek, program dan kegiatan.

## **I.6. Metode Penelitian**

### **I.6.1. Tipe Penelitian**

Pada penelitian mengenai Upaya Perempuan Aktivistis Buruh Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Normatif Buruh Perempuan di Perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto akan digunakan pendekatan eksploratif-kualitatif. Pendekatan eksploratif-kualitatif ini digunakan karena peneliti memiliki anggapan bahwa keterlibatan Perempuan Aktivistis Buruh terhadap isu gender dalam dunia perburuhan. Peneliti menafsirkan pemahaman terhadap perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain yang dilakukan oleh Perempuan Aktivistis Buruh di Kabupaten Mojokerto. Peneliti menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori secara deduktif melainkan berangkat dari fakta dari kondisi perburuhan di Kabupaten Mojokerto yang berkembang pesat dan di dalam struktur perburuhan tersebut terdapat permasalahan-permasalahan mengenai perempuan. Karenanya, secara epistemologis, paradigma kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk tetap mengakui fakta empiris sebagai sumber pengetahuan tetapi tidak menggunakan teori yang ada sebagai bahan dasar untuk melakukan verifikasi.

### **I.6.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana perempuan aktivis buruh di Kabupaten Mojokerto menyusun isu-isu gender terutama terhadap hak-

hak normatif buruh perempuan dalam agenda sebagai bentuk solidaritas sesama buruh agar tidak ada lagi ketertindasan perempuan di lingkungan perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto. Karena selama ini di dalam perusahaan ternyata ada yang membedakan perlakuan terhadap buruh laki-laki dan buruh perempuan. Perbedaan itu telah berlangsung karena adanya struktur patriarki di dalam sistem kapitalis sehingga buruh-buruh perempuan di Kabupaten Mojokerto masih terbelenggu. Oleh karena itu perlu adanya upaya pembebasan perempuan di lingkungan perusahaan terhadap hak-hak normatif mereka.

### **I.6.3. Subyek Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model *Snowball Sampling* karena peneliti dalam mendapatkan data dengan berdasarkan pada rekomendasi dari narasumber yang ditemui. Dengan model ini peneliti akan mencari tahu atas kelengkapan data yang akan didapatkan dari berbagai narasumber karena dalam membahas sebuah pelanggaran hak normatif buruh perempuan tentunya tidak hanya membutuhkan satu orang saja sebagai narasumber melainkan dibutuhkan rekomendasi dari narasumber yang ditemui sebagai data penguat dari jawaban yang didapat.

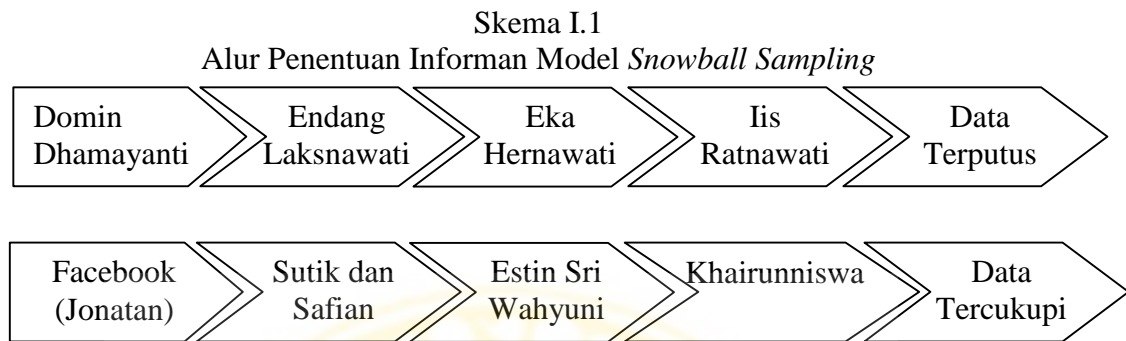
Narasumber yang ditemui ini berawal atas rasa keingintahuan peneliti berkaitan permasalahan buruh perempuan di Indonesia yang mana sering kali peneliti menemui pemberitaan mengenai kasus-kasus yang dialami oleh buruh perempuan. Berawal dari sinilah peneliti mencoba mencari tahu bagaimana kondisi empiris buruh perempuan di Jawa Timur sehingga peneliti dipertemukan pada perempuan aktivis buruh yang sudah memiliki jaringan pada serikat-serikat

buruh di Jawa Timur yaitu Dhomin Damayanti. Ia menceritakan bahwa kondisi buruh perempuan di Jawa Timur ternyata masih mengalami bentuk ketertindasan yang mencolok di lingkungan perusahaan. Kemudian ia mengajak peneliti untuk ikut aksi menuntut hak normatif yang dilanggar oleh salah satu perusahaan di Kota Surabaya.

Pada aksi yang diikuti oleh peneliti ini dipertemukan pada perempuan aktivis buruh di Kabupaten Mojokerto yaitu Endang Laksanwati yang juga bekerja sebagai buruh di PT Alu Aksara Pratama, Kabupaten Mojokerto. Dari sinilah peneliti tertarik untuk mewawancari Endang Laksanwati untuk mengeksplorasi kondisi buruh perempuan di Kabupaten Mojokerto. Kemudian, setelah menemui Endang Laksanwati secara beberapa kali, peneliti direkomendasikan untuk menemui narasumber lain yang dapat digali informasi mengenai buruh perempuan, sehingga dari narasumber yang secara runtun inilah peneliti mendapatkan rekomendasi untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan buruh perempuan di lingkungan perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto.

Namun, ternyata model ini mengalami kendala saat peneliti masih merasa kurang informasi yang didapatkan, karena narasumber terakhir tidak bersedia memberikan rekomendasi narasumber lain dari penelitian ini. Kendala ini diatasi oleh peneliti dengan mencoba mencari informasi melalui media sosial *Facebook*. Dalam media sosial ini peneliti menemukan akun Serikat Buruh Madani (SBM) Jawa Timur yang membantu peneliti untuk dipertemukan pada basis jaringannya di Kabupaten Mojokerto. Salah satu aktivis buruh yaitu Jonatan SBM Jawa timur

yang direkomendasikan akhirnya memberikan kontak perempuan aktivis buruh di Kabupaten Mojokerto yang dapat ditemui untuk menjadi narasumber.



Oleh karena itu berdasarkan alur yang dijalani peneliti maka subyek penelitian ini sebanyak sebelas orang. Kesebelas narasumber ini dipilih atas pertimbangan peneliti sebagai berikut:

- a. Perempuan aktivis buruh sebagai pejuang para buruh-buruh perempuan di Kabupaten Mojokerto untuk berserikat dan berkumpul dalam melakukan pelatihan dan pendidikan mengenai isu-isu gender.
- b. Perempuan aktivis buruh sebagai mediator kaum buruh perempuan di Kabupaten Mojokerto kepada pihak perusahaan maupun pemerintah.
- c. Perempuan aktivis buruh memiliki visi untuk memperjuangkan hak-hak buruh perempuan dan mencegah ketertindasan yang terjadi di lingkungan perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto.
- d. Organisasi asal dipilih karena mengetahui *trade record* dari perempuan aktivis buruh di Kabupaten Mojokerto selama memperjuangkan hak-hak buruh perempuan.
- e. Buruh perempuan di Kabupaten Mojokerto dipilih karena sebagai obyek dari upaya *Gender Awareness* sehingga untuk mengetahui



upaya apa saja yang berpengaruh untuk meningkatkan semangat buruh perempuan memperjuangkan hak normatif mereka di lingkungan perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto

- f. Pihak Perusahaan bagian HRD dipilih karena bagian HRD Manajer SDM ini berperan dalam mengawasi perekrutan, mewawancarai, dan mempekerjakan karyawan baru dan bertindak sebagai penghubung antara manajemen perusahaan dengan karyawannya. Sehingga, peneliti dapat mengetahui kondisi buruh perempuan sehari-hari di lingkungan perusahaan baik dalam kebijakan dan pelaksanaannya.

Jadi, secara ringkas mengenai profil para narasumber pada tabel berikut ini:

**Tabel I.1**  
**Nama Narasumber Penelitian**

<b>Nama</b>	<b>Asal Organisasi</b>
Endang Laksanawati	Serikat Buruh Kerakyatan (SBK)
Iis Ratnawati	Pergerakan Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI)
Estin Sri Wahyuni	Pergerakan Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI)
Eka Hernawati	Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Khairunniswa	Organisasi Mahasiswa "Pembebasan"
Sutik	Serikat Buruh Madani (SBM)
Dhomin Damayanti	Institut Solidaritas Buruh Surabaya (ISBS)
Yayak Aslihol	Pergerakan Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI)
Safian	Serikat Buruh Madani (SBM)
Rumaiyah	Buruh Perempuan
Fitri	Perusahaan PT. MAC Bagian HRD

#### **I.6.4. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara, buku catatan, alat perekam suara, dan kamera. Pedoman wawancara yang secara sistematis tersusun pada *in-depth interview*. *In-depth Interview* berarti proses memperoleh kejelasan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai. Pada instrumen ini peneliti lebih terfokus pada daftar pertanyaan yang dipilah berdasarkan subyek penelitian yaitu perempuan aktivis buruh, asal serikat buruh, buruh perempuan, dan pihak perusahaan. Daftar pertanyaan yang telah tersusun dalam pedoman wawancara ini dapat bermanfaat untuk membatasi pertanyaan-pertanyaan di luar fokus penelitian sehingga keakuratan data dapat teruji validitasnya saat narasumber memberikan jawaban.

Buku catatan akan berguna dalam meringkas dan mencatat jawaban-jawaban dari narasumber secara inti. Untuk mencegah jawaban yang terlewatkan maka peneliti juga menggunakan alat perekam suara sehingga seluruh percakapan dapat terekam. Selain itu, kamera akan berfungsi untuk mengambil gambar-gambar yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk memudahkan mendeskripsikan secara simbolik situasi dan kondisi saat peneliti melakukan penelitian. Peneliti akan menggunakan gambar seperti contoh dokumentasi perempuan aktivis buruh dalam turun aksi, pemogokkan, serta saat melakukan wawancara. Karena melalui dokumentasi gambar ini akan digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan kondisi saat peneliti masuk ke dalam lapangan.

### **I.6.5. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa prosedur untuk mengumpulkan data penelitian sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Pengamatan data secara langsung terhadap subyek yaitu Perempuan Aktivistis Buruh di Kabupaten Mojokerto sebagaimana adanya di lapangan. Prosedur observasi ini merupakan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung oleh panca indera seperti mata, tangan, kaki, telinga dan mulut. Observasi yang akan dilakukan peneliti adalah dengan mengikuti beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh serikat buruh asal maupun dari Perempuan Aktivistis Buruh di Kabupaten Mojokerto. Salah satu kegiatan yang pernah diikuti adalah unjuk rasa di Grahadi pada Peringatan Hari Buruh Tani serta penetapan UMK 2015 yang diikuti oleh mayoritas buruh perempuan, kemudian kegiatan Perempuan Aktivistis Buruh yang berkenaan dengan pengorganisasian massa di dalam serikat seperti Pelatihan dan Pendidikan Perburuhan, serta pernah mengikuti pendampingan yang dilakukan oleh Perempuan Aktivistis Buruh terhadap anggotanya yang sedang menjalani proses persidangan di PHI Surabaya.

#### **2. Wawancara Mendalam**

Dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam terhadap narasumber yang berkaitan dengan fokus penelitian. Secara sederhana wawancara adalah sebuah prosedur pengumpulan data yang didapatkan oleh peneliti melalui percakapan dengan narasumber. Wawancara

mendalam yang dilakukan peneliti ini dilakukan secara berkala dimana peneliti pada pertemuan pertama pada perempuan aktivis buruh akan melakukan pendekatan personal sehingga dari cara ini akan membangun keterikatan antara peneliti dan narasumber. Keterikatan ini juga akan berdampak pada penggalan informasi karena narasumber akan semakin terbuka menjelaskan permasalahan-permasalahan buruh perempuan di Kabupaten Mojokerto. Kemudian, setelah mendapatkan simpati dari perempuan aktivis buruh, peneliti mencoba menggiring beberapa pertanyaan pada permasalahan buruh perempuan di lingkungan perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto.

### **3. Studi Kepustakaan**

Prosedur ini merupakan prosedur yang dibutuhkan untuk memperkuat data, terutama sebagai acuan pengecekan ulang untuk kebenaran pengamatan. Kemampuan peneliti untuk menyusun kerangka teoritis akan sangat terkait dengan upaya penelusuran studi kepustakaan, sebagai upaya memperoleh sejumlah referensi yang mendukung dan tepat untuk membahas lingkup kajian penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, sumber studi kepustakaan berupa penyimpan materi-materi yang pernah digunakan dalam pelatihan perburuhan.

### **4. Penelusuran Data Online**

Penelusuran online adalah proses pengumpulan data penguat atas informasi yang diterima peneliti. Informasi data mengenai penelitian ini melalui media online atau internet, berupa artikel, *e-book*, maupun berita.

### **I.6.6. Prosedur Analisis Data**

Prosedur analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Langkah-langkah menganalisis data adalah sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan buruh perempuan dan upaya yang dilakukan oleh perempuan aktivis buruh di Kabupaten Mojoekerto, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali. Peneliti juga akan mencari referensi studi penelitian yang terdahulu yaitu skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan buruh perempuan dan penguatan gender. Hal ini berguna untuk membantu peneliti mampu menganalisis sesuai fokus penelitian.

#### **2. Display Data**

*Display* data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian dari hasil reduksi data dan display data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data memverifikasikan sehingga menjadi kebermanaan data. Dalam tahap ini peneliti harus mampu menafsirkan segala perkataan dan perbuatan dari informan untuk dapat menjelaskan secara nyata. Dalam tahapan ini, peneliti akan mengutip percakapan yang dilakukan dengan merangkum dan mengaitkannya dengan teori feminis sosialis yang digunakan oleh peneliti.

### 3. Analisis dan Kesimpulan Data

Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk kesimpulan yang coba-coba maka harus diverifikasi terlebih dahulu. Semua hasil atau perolehan data di lapangan terlebih dahulu dikategorikan berdasarkan fokus pertanyaan sehingga dapat mempermudah peneliti untuk menyusun penulisan laporan dan data akan disaring berdasarkan kebutuhan dari penelitian, sehingga menjamin signifikansi atau kebermaknaan hasil penelitian.

